



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2022**

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Segalapuji dan rasa syukurkehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

LPPD ini disusun untuk memberigambaran *keadaan* dan informasi kinerja kegiatan Dinas Perikanan tahun 2022 sertamerupakan tolakukur di dalam penyelenggaraan pembangunan Perikanan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Diharapkan LPPD Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pihak yang terkait tentang pencapain kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan LPPD ini, diucapkan terima kasih.

Benteng, Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan

Ir. Makkawaru

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630120 198910 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD 1

1.2. Struktur Organisasi..... 4

1.3. Tugas Pokok dan fungsi 5

1.4. Sistematika Penulisan 13

BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.1. Capaian Kinerja urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci
Keluaran/Output 18

2.2. Capaian Kinerja urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci
Hasil/Outcome 20

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah
..... 25

BAB III. PENUTUP

A. KESIMPULAN 44

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi 5°42'-7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur. Bentang wilayah tersebut mencapai luas 10.503,69 km² dimana luas wilayah perairan lautnya sekitar 9.146,66 km² atau sekitar 87,08% dari total luas kabupaten. Wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki keanekaragaman hayati kelautan dan perikanan yang melimpah dengan keberadaan ekosistem pesisir yang lengkap dan sumberdaya perikanan yang tinggi. Sehingga memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan dengan gugus pulau sebanyak 130 buah pulau dan panjang garis pantai sekitar 670 km.

Letak dan posisi geografis tersebut telah menempatkan Kepulauan Selayar berada di tengah-tengah Indonesia sehingga menempati posisi strategis dalam konektivitas pembangunan nasional karena merupakan pintu gerbang dan jembatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI, terutama jalur penghubung (hub) distribusi arus barang dan jasa.

Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar ini disertai dengan keanekaragaman potensi yang mendukung sektor kelautan dan perikanan dalam Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) 713 dan berada tepat dalam fishing ground Selat Makassar dan Laut Flores. Berbagai komoditas penting kelautan dan perikanan banyak ditemukan di perairan Kepulauan Selayar seperti ikan pelagis besar dan kecil (tuna, tongkol, cakalang, layang, teri, cumi-cumi, dll), ikan demersal (kerapu, sunu, dll), dan mollusca (lobster, udang, teripang, dll) yang didukung oleh keragaman ekosistem pesisir lengkap yaitu terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove.

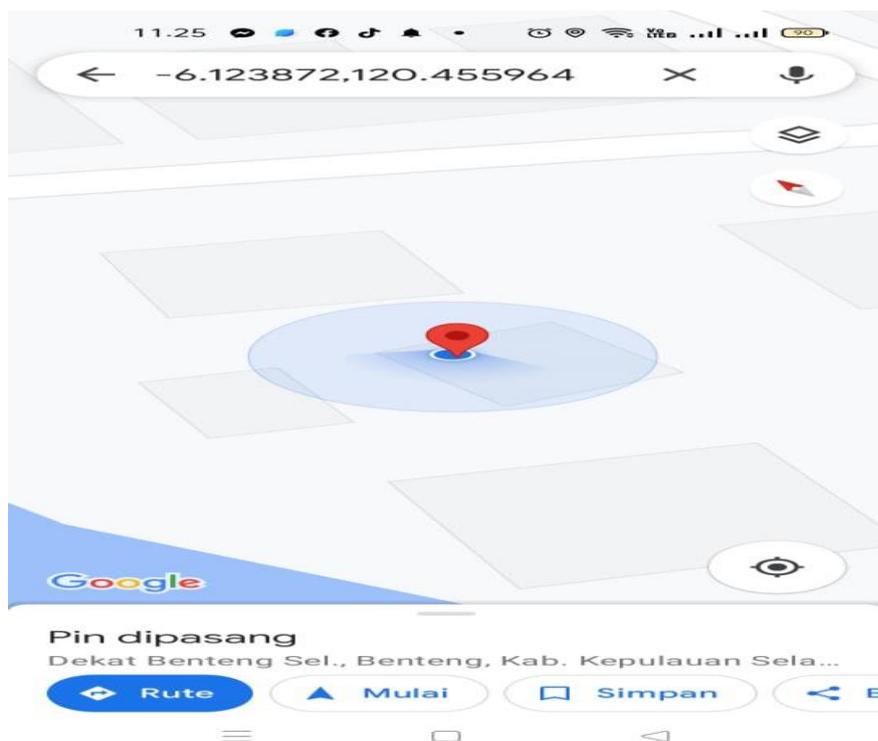
Selain itu, perairan Kepulauan Selayar juga sangat berkontribusi terhadap penyebaran larva ikan dan plasma nutfah bagi kawasan perairan lainnya di Indonesia karena menjadi salah satu jalur utama lintasan Arus Laut Indonesia (Arlindo). Untuk menjaga potensi nasional tersebut, Kepulauan Selayar telah ditetapkan sebagai “Cagar Biosfir Dunia” dengan keberadaan berbagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang tidak tanggung-tanggung mulai Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate seluas 530.760 ha, KKPD Pulo Kauna Kayuadi (status pencadangan) seluas 3.983 ha, KKPD Pulo Pasi Gusung (status pencadangan) seluas 5.018 ha, dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 60 lokasi pada 52 desa seluas 545.655 ha.

Olehnya itu pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai sektor prioritas yang diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan sekitarnya karena tingginya potensi yang dimiliki (SDA dan kawasan) maupun banyaknya masyarakat (lokal dan sekitarnya) yang bergantung pada kemajuan pembangunan sektor tersebut.

1.1.1. Dinas Perikanan beralamat di Jalan K.H.Ahmad Dahlan Kompleks TPI Bonehalan, dengan Email dkpselayar@yahoo.co.id



1.1.2. Titik koordinat Dinas Perikanan adalah 6.123872,120.455964



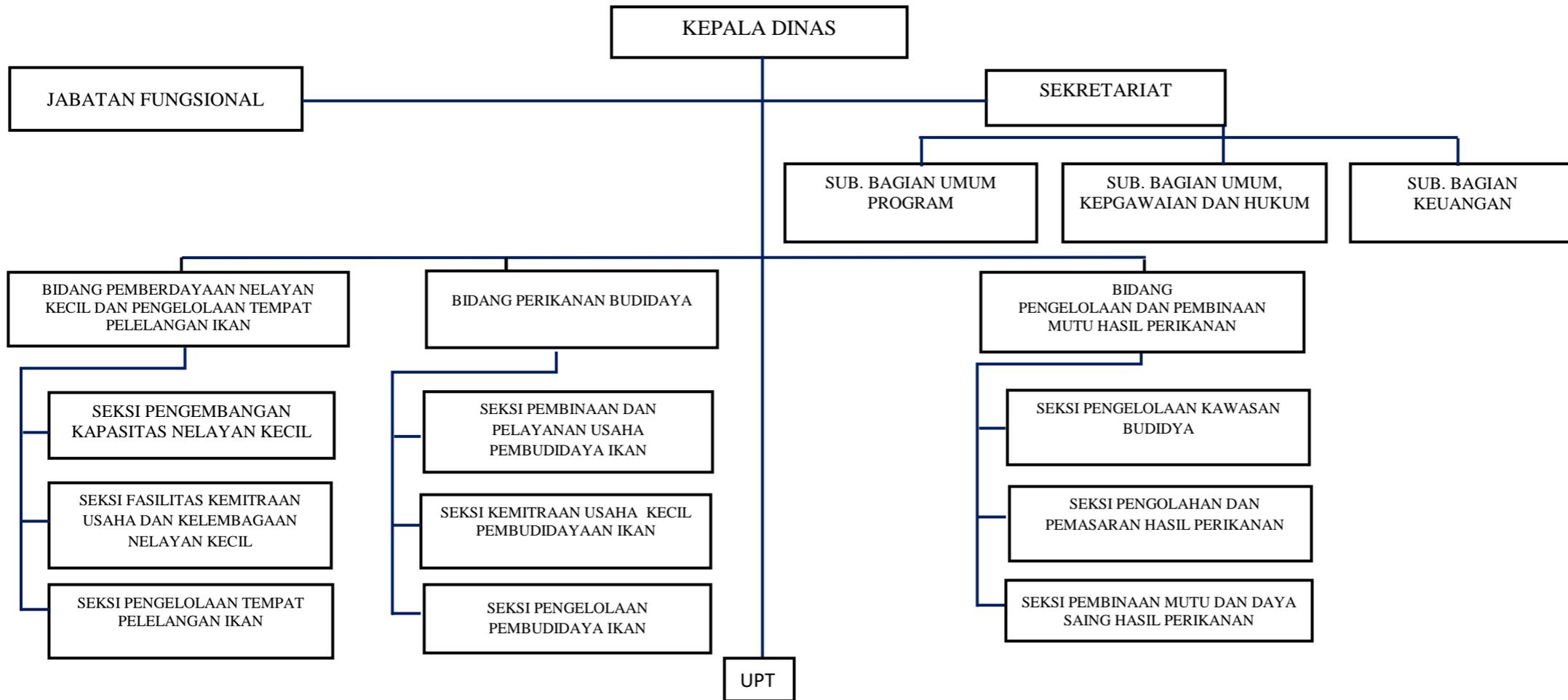
1.2 . Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan. Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
3. Melaksanakan fungsi administrasi di lingkup Dinas Perikanan.
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 11 Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur organisasi Dinas Perikanan adalah :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Program.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.
- III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, meliputi :
 1. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
 2. Seksi Fasilitas Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil.
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
- IV. Bidang Pemberdayaan Usaha kecil Pembudidayaan ikan, meliputi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pembudi Daya Ikan.
 2. Seksi Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, meliputi :
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan
- VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Secara umum Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyusun rencana kegiatan Dinas Perikanan sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- menyelenggarakan administrasi Dinas Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, dan
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

II. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas.
- pengoordinasian penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi keuangan.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD).
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- pengoordinasian urusan pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah
- pengoordinasian urusan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- pengoordinasian urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan

Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha dan kelembagaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten.
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan pendaftaran usaha pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- melakukan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil.
- melakukan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- Melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan kecil.
- melakukan pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam kabupaten.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dalam lingkup kewenangan kabupaten.
- melaksanakan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.
- melaksanakan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- melaksanakan fasilitasi bahan verifikasi dan kajian untuk pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan

UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyediaan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan bina usaha hasil produksi perikanan.

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan status kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Pegawai Negeri Sipil	19	17	37
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Pegawai Tidak Tetap	27	35	62
	Jumlah	46	52	99

Tabel. 2
Jumlah PNS Dinas Perikanan berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	S2	1	3	4
4	S1	15	13	28
3	D3	3	1	4
4	D2	0	0	0
5	D1/SLTA	1	0	1
	Jumlah	20	17	37

Tabel. 3
Jumlah PNS Perikanan berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH	
			L	P
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
2	Pembina Tk.I	IV/b	-	-
3	Pembina	IV/a	1	3
4	Penata Tk. I	III/d	3	3
5	Penata	III/c	5	4
6	Penata Muda Tk.I	III/b	4	1
7	Penata Muda	III/a	3	9
8	Pengatur Tk.I	II/d	-	-
9	Pengatur	II/c	-	-
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-
11	Pengatur Muda	II/a	-	-
	Jumlah		17	20

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DKP Kab. Kepulauan Selayar
per-Desember 2022

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan instansi lainnya.

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, diatur sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat penjelasan gambaran umum, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktura.

BAB II bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output, Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

BAB III Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dinas Perikanan selaku penanggungjawab sistem pembangunan perikanan untuk menyediakan layanan terhadap pembangunan perikanan yang terjangkau, bermutu, bersaing dan berkelanjutan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan memiliki Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026. Renstra ini mengorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada serta memuat tujuan dan sasaran serta prioritas kebijakan pemerintah daerah sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan acuan perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif, yang memuat gambaran pelayanan dinas, uraian capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir, isu dan permasalahan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan. Untuk itu, pembangunan bidang perikanan tahun 2021-2026 akan menjabarkan agenda-agenda pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan ketersediaan konsumsi ikan, serta perluasan kesempatan kerja.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Kepla Daerah yang terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”.

Dalam rumusan ini terdapat 2 (dua) pokok visi yakni “*Bandar Maritim*” dan “*Kawasan Timur Indonesia*”. Pernyataan visi ini mengandung dua makna yaitu :

1. Bandar Maritim adalah Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industry, dan
2. Kawasan Bandar Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industry, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagiat Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2022 – 2026, merumuskan dan menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bertitik tolak dari enam (6) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2022 terdapat satu (1) misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Misi ke-4: Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Misi ke-4 RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T-5) dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tujuan ke-5 ini juga memuat 3 (tiga) sasaran masing-masing :

- a. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6) dengan indikator yaitu Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.
- b. Meningkatnya usaha pariwisata (S-7) dengan indikator yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
- c. Meningkatnya Usaha Kepelabuhanan (S-8) dengan indikator Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan,

1. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar di Bidang Perikanan untuk setiap Sasaran Strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki tolak ukur yang disebut sebagai Indikator Kinerja dan target. Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud ditampilkan dibawah ini.

**Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan (S-2)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)	Ton	24.648.26

		Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Rp. 1 M	2119.64
2.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (S-3)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845,74
3.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya (S-4)	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976,72
4.	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan (S-5)	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	186,57

Dinas Perikanan untuk merealisasikan target-target sasaran strategis dan indikator kinerja secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja yang terdapat dalam bidang sasaran tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan instansi dan capaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal (skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan). Baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut:

	≥80 %	Sangat Berhasil
70 %	≤ X < 85 %	Berhasil
55 %	< X < 70 %	Cukup Berhasil
X	≤ 55 %	Belum Berhasil

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output.

Capaian Kinerja Urusan Pemerintah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan berdasarkan permendagri 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

N O	URUSAN PEMERINTAH	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	1. Dinas Kelautan dan Perikanan				
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) - Jumlah RTP Perikanan Tangkap - Jumlah RTP Perikanan Budidaya		7.506 603	<i>Data berdasarkan kegiatan statistik perikanan</i>
		2. Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional (1) $X 100\%$ Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (1) Capaian Kinerja = 100%	100%	KEPMEN KP RI No. 37 KEPMEN – KP/2018/ tentang penetapan pelabuhan perikanan Bonehalang sebagai pangkalan pendaratan ikan bonehalang , Kab. Kep. Selayar Prov. Sulsel

		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang diterbitkan.		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar dan Izin Usaha Perikanan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota ada 30 layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Dokumen terlampir
		4. Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Temu Lapang Pembudidayaan Ikan 50 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Dokumen terlampir
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi		<p>Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan bantuan</p> <p>Pembudidaya Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasaran Rumput Laut 8 Kelompok - Sarana dan Prasaran Air Tawar 8 Kelompok - Tambak Milenia 1 kelompok - Saluran Pintu Monik 1 kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Dokumen terlampir

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome.

Capaian Kinerja Urusan Pemerintah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	1. Dinas Kelautan dan Perikanan			
		1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)		
		- Produksi Perikanan Tangkap	21.223.4	<i>Data berdasarkan kegiatan statistik perikanan</i>
		- Produksi Perikanan Budidaya	543.50	<i>Data berdasarkan kegiatan statistik perikanan</i>

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis: “ Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan diukur oleh 5 (lima) indikator kinerja namun hanya 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) yakni (1). Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, (2). Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Pengukuran dan analisis capaian dari ke-2 (dua) indikator diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Indikator ke-1 : Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran produksi perikanan tangkap dilakukan dengan metode statistik perikanan dengan teknik sampling yakni melakukan perhitungan produksi perikanan melalui desa sampel yang dipilih secara sengaja melalui kerangka survei. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas statistik Dinas Perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022 dan analisa perbandingan antara target dan realisasi capaian berdasarkan indikator kinerja disajikan pada tabel di bawah ini secara berturut-turut.

Tabel 1.
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.845.74	21.223.4	97.15	Sangat Tinggi

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022

Tabel 2.
Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1673.9	6332.8	7547	5669.7	21.223.4

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022

Capaian indikator kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2021 meingkat dibanding dengan produksi tahun 2021 namun tetap tidak mencapai target dengan target yang ditentukan sebesar 36.938.08 ton dan hanya mencapai 20.883.8 ton atau sebesar. 56.53%. Ha ini juga akan berkontribusi secara nyata terhadap menurunnya pendapatan nelayan (NTN) dan nilai PDRB subsektor perikanan. Perbandingan antara target kinerja dan capaian indikator peningkatan produksi perikanan tangkap selama periode Renstra 2016 – 2020, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap	Periode RENSTRA					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Target (Ton)	36.938.08	21.845.74	23.593.40	25.480.87	27.519.34	29.720.89
Realisasi (Ton)	20. 883.8	21.223.4	0	0	0	0
Capaian (%)	56.53	97.15	0	0	0	0

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021 – 2026

Program dan kegiatan yang mendukung Capaian Indikator: Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
I	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.109.014.874	92.26
1.	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	46.719.000	46.522.600	99.58
2.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.762.263.405	3.444.174.363	91.55
3.	Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	58.595.000	58.273.000	99.45
4.	Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha	148.308.000	146.096.713	98.51
5	Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	7.973.000	6.753.000	98.51
6	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	429.815.000	407.195.198	94.74

2. Capaian Indikator ke-2 : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup), budidaya air tawar (lele), dan budidaya air payau (udang dan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2022, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.

Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	84.79	164.17	159.12	135.42	543.50
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022						

Tabel 5.

Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	976.72	543.50	55.64	Rendah
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022						

Tabel 6.

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2034	Tahun 2025	Tahun 2026
Target (Ton)	961.13	976.72	1.054.86	1.139.25	1230.39	1.328.82
Realisasi (Ton)	522.79	543.50	0	0	0	0
Capaian (%)	54.39	55.64	0	0	0	0
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021 – 2026						

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 hanya mencapai 543.50 ton atau sebesar 55.64% dari target yang ditentukan sebesar 976.72 Ton.

Program dan kegiatan yang mendukung Capaian Indikator: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
I	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	782.985.740	92.32
1.	Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	215.400.000	171.729.900	79.72
	Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	14.813.000	14.748.000	99.56
	Kegiatan Pengembangan Pembudidayaan Ikan Kecil	31.550.000	31.550.000	100

	Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	26.880.000	26.847.000	99.88
	Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.505.000	16.500.000	99.97
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.938.000	62.936.600	100
	Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100
	Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	448.295.240	446.935.240	99.70
	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	19.778.000	19.778.000	100
	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatn air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	117.709.450	117.705.900	100
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.005.479.740	899.759.292	89.49
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten	37.575.000	37.440.000	99.64

	Kegiatan Pelaksanan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	84.688.000	81.703.000	96.48
	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	765.138.000	687.389.000	100
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.511.000	113.355.400	99.86

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2022 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal. Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu Pos yang diharuskan untuk belanja pegawai misalnya: gaji dan tunjangan pegawai, Pos pengeluaran belanja barang dan jasa yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Total pagu belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp. 10.628.129.359,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dari jumlah tersebut belanja *Pegawai* mendapat alokasi sebesar Rp. 2.997.498.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.965.458.247,- atau (98.93%), belanja *Hibah* mendapat alokasi sebesar Rp. 3.643.071.695,- terealisasi sebesar Rp.

3.476.215.863,- atau (95.42%), belanja *Barang dan Jasa* mendapat alokasi sebesar Rp. 2.946.519.664,- terealisasi sebesar 2.863.718.455,- atau (97.19%) dan belanja modal mendapat alokasi Rp. 1.009.170.000,- terealisasi Rp. 928.968.970,- atau (92.05%) (data per 31 Desember 2022).

Table 7.
Realisasi Belanja Dinas Perikanan Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja	10.628.129.359	10.022.540.785	94.30
2.	Belanja Pegawai	2.997.498.000	2.965.458.247	98.93
3.	Belanja Barang Jasa	2.946.519.664	2.863.718.455	97.19
4.	Belanja Hibah	3.643.071.695	3.476.215.863	95.42
5.	Belanja Modal	1.009.170.000	928.968.970	92.05

Rp. 10.628.129.359,00

X 100 % = 94.30%

Rp. 10.022.540.785,00

Jumlah program yang mendukung capaian kinerja dinas Perikanan dilaksanakan berjumlah 4 program, 18 Kegiatan dan 57 sub. kegiatan untuk tahun anggaran 2022.

Adapun Realisasi Program yang mendukung capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Table 8.

NO	Program	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.320.812.524	4.230.780.971	90.031.553	97.91
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.109.014.874	344.658.531	92.26
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	782.985.740	65.177.950	92.32
4	Pengolahan dan Pemasaran	1.005.479.740	899.759.292	105.720.448	89.49
JUMLAH		10.628.129.359	10.022.540.785	676.153.724	94.30

Table 9.

Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

NO	Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.320.812.524	4.230.780.971	97.91
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah	291.613.750	288.585.250	98.96
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.209.000	98.758.000	99.55
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.428.700	6.408.700	99.69
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.641.950	5.231.950	92.73
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.073.000	4.983.000	98.23

	Sub. Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.087.500	4.886.000	96.04
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.403.300	8.633.300	82.99
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.770.300	159.684.300	99.95
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.024.648.900	2.992.599.147	98.94
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.498.000	2.965.458.247	98.93
	Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.150	10.000.150	100
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.198.700	8.198.700	100
	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.842.550	3.842.550	100
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.354.000	2.344.000	99.58
	Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.755.500	2.755.500	100
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	9.807.200	9.807.200	100
	Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.737.300	2.737.300	100
	Sub. Kegiatan Rekonsiliasi	2.420.000	2.420.000	100

	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.649.900	4.649.900	100
4.	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.180.650	8.230.650	73.63
	Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah	5.000.000	2.050.000	41.00
	Sub. Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.180.650	6.180.650	100
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.572.200	199.276.200	91.17
	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.492.000	50.492.000	100
	Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.581.500	314.581.500	99.68
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000	2.200.000	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000	3.300.000	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.687.500	7.687.500	88.49
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	7.800.000	7.800.000	100

	Perundang-undangan			
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.594.000	293.594.000	100
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.870.000	13.870.000	100
	Sub.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.870.000	13.870.000	100
	Sub.Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	0	0	0
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415.213.847	413.967.547	99.70
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.773.800	6.773.800	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	108.204.847	106.959.347	98.85
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.235.200	300.234.400	100
9.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.404.677	138.647.677	73.56
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	38.630.000	38.630.000	100
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.671.379	51.671.379	100

	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.031.298	3.274.298	6.17
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.072.000	45.072.000	100
II	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.109.014.874	92.26
1.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusaakan dalam satu daera Kabupaten/Kota	46.719.000	46.522.600	99.58
	Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	46.719.000	46.522.600	99.58
2.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.969.166.405	3.648.544.076	91.92
	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.762.263.405	3.444.174.363	91.55
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	58.595.000	58.273.000	99.45
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha	148.308.000	146.096.713	98.51
3.	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	437.788.000	413.948.198	94.55
	Sub. Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan	7.973.000	6.753.000	98.51

	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan			
	Sub. Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	429.815.000	407.195.198	94.74
III	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	782.985.740	92.32
1.	Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	9.695.000	9.695.000	100
2.	Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.	14.813.000	14.748.000	99.56
3.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	31.550.000	31.550.000	100

4.	Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	26.880.000	26.847.000	99.88
5.	Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.505.000	16.500.000	99.97
6.	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.938.000	62.936.600	100
7.	Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100
8.	Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	448.295.240	446.935.240	99.70
9.	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	19.778.000	19.778.000	100
10.	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk Pembudidaya Ikan di Darat	117.709.450	117.705.900	100
IV	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.005.479.740	899.759.292	89.49
1.	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten	37.575.000	37.440.000	99.64

2.	Kegiatan Pelaksanan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	84.688.000	81.703.000	96.48
3	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	765.138.000	687.389.000	100
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.511.000	113.355.400	99.86

Berikut ini program dan kegiatan Dinas Perikanan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub. Kegiatan Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. *Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat*
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan retribusi Daerah
 - d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
 5. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 6. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Pengadaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya
8. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
 - b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. *Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
2. *Kegiatan Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota*
 - b. Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembetulan dan Pembangunan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - d. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Keitraan Usaha
3. *Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*
 - a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
 - b. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
2. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
3. Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil
4. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
5. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
6. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
9. Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat
11. Perencanaan, pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidaya Ikan di Darat

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran

1. *Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.*
 - a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengelohan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten
2. *Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*

- b. Sub. Kegiatan Pelaksanan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3. *Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - a. Sub. Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Adapun realisasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.320.812.524	4.230.780.971	90.031.553	97.91
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.453.673.405	4.109.014.874	344.658.531	92.26
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	848.163.690	782.985.740	65.177.950	92.32
4	Pengolahan dan Pemasaran	1.005.479.740	899.759.292	105.720.448	89.49
JUMLAH		10.628.129.359	10.022.540.785	676.153.724	94.30

Uraian dari realisasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian keberhasilan kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp **291.613.750,-** Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. **288.585.250,-** atau **98.96%**. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase

Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.209.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 98.758.000,- atau sebesar 99.55%.
- b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.428.700,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.428.700,- atau sebesar 99.69%.
- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.641.950,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 5.231.950,- atau sebesar 92.73%
- d. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.073.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.983.000,- atau sebesar 98.23%
- e. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.087.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.886.000,- atau sebesar 96.04%.
- f. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.403.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.633.300,- atau sebesar 82.99%
- g. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.770.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 159.684.300,- atau sebesar 99.95%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3.024.648.900,-** Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. **2.992.599.147,-** atau **98.94%**. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Keterpenuhan Dokumen Adminstrai Keuangan Perangkat Daerah 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.997.498.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.965.458.247,- atau sebesar 98.93%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.150,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 10.000.150,- atau sebesar 100%.

- c. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.198.700,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.198.700,- atau sebesar 100%.
- d. Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.842.550,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.842.550,- atau sebesar 100%.
- e. Sub. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.354.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.344.000,- atau sebesar 99.58%.
- f. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.755.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.755.500,- atau sebesar 100%

3. Kegiatan Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan *Administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.807.200,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 9.807.200,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Keterpenuhan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah 1 Dokumen.

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.737.300,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.737.300,- atau 100%
- b. Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.420.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.420.000,- atau 100%
- c. Sub. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.649.900,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 4.649.900,- atau 100%

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah

Kegiatan *Administrasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah* mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.180.650,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.230.650,- atau

73.63%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah.

- d. Sub. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribu Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.050.000,- atau 41%
- e. Sub. Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.180.650,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.180.650,- atau 100%

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.492.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.492.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah 100%.

- a. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.492.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.492.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.581.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 314.581.500,- atau 99.68%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 12 bulan.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.200.000,- atau sebesar 100%
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.300.000,- atau sebesar 100%.
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.687.500,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 7.687.500,- atau sebesar 88.49%.

- d. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.800.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 7.800.000,- atau sebesar 100%.
- e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.594.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 293.594.000,- atau sebesar 100%.

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 13.870.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%.

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 13.870.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.213.847,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 413.967.547,- atau 99.70%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.773.800,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.773.800,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.204.847,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 106.959.347,- atau sebesar 98.85%
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.235.200,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 300.234.400,- atau sebesar 100%

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.404.677,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 138.647.677,- atau 73.56%. Keluaran kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100%.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.630.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 38.630.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.671.379,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 51.671.379,- atau sebesar 100%
- c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.031.298,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.274.298,- atau sebesar 6.17%.
- d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.072.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 45.072.000,- atau sebesar 100%.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Capaian keberhasilan kegiatan dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.719.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 46.522.600,- atau 99.58%. Keluaran kegiatan ini adalah Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten 4 Dok.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.719.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 46.522.600,- , - atau sebesar 99.58%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan *Kegiatan* Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.969.166.405,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.648.544.076,- atau 91.92%. Keluaran kegiatan ini adalah Capaian Bina Kelompok Nelayan (KUB) 100% dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 9696.07 Ton.

- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.762.263.405,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 3.444.174.363,- atau sebesar 91.55%
- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.595.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 58.273.000,- atau sebesar 99.45%
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemtraan Usaha mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.308.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 146.096.713,- atau sebesar 98.51%

3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.788.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 413.948.198,- atau 94.55%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TP) dan Sentra Pendaratan yang Operasional 2 unit dan Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sentra Pendaratan yang Operasional dan Terkelola 1 unit TPI.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.973.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 6.753.000,- atau sebesar 98.51%.

- b. Sub. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.815.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 407.195.198,- atau sebesar 94.74%.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya danlam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya danlam 1 (satu) Daerah Kabupate/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.508.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 24.443.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan iizin usaha perikanan 3 rekomendasi.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan dan Persyaratan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan Serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.695.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 9.695.000,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Perikanan Pembudidaya Ikan yang Usahanya, Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Tekonologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif dan serta tidak menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.813.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 14.748.000,- atau sebesar 99.56%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.430.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 58.397.000,- atau 100 %. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok yang Diberdayakan sebanyak 4 Kelompok.

- a. Sub. Kegiatan Pengembangan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.550.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 31.550.000,- atau sebesar 100%.

- b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.880.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 26.847.000,- atau sebesar 99.88%.

3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.505.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 16.500.000,- atau 99.97%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan untuk pengurusan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil sebanyak 25 rek TDP.

- a. Sub. Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 0,- atau sebesar 0%.
- b. Sub. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.505.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 16.500.000 atau sebesar 99.97%.

4. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan.

Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.720.690,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 683.645.740,- atau 91.31%. Keluaran kegiatan ini adalah Cakupan Bina kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 6 Kelompok.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.938.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 62.936.600,- atau sebesar 100%.
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000,- atau sebesar 100%.
- c. Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana dan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.295.240,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 446.935.240,- atau sebesar 99.70%.

- d. Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.778.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 19.778.000,- atau sebesar 100%.
- e. Sub. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk Pembudidaya Ikan di Darat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.709.450,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 117.705.900,- atau sebesar 100%.

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.575.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 37.440.000,- atau 99.64%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan sebanyak 2 Dokumen.

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.575.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 37.440.000,- atau sebesar 99.64%.

2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.688.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 81.703.000,- atau 96.48%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro yang mendapatkan Pembinaan sebanyak 50 Orang.

- a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.688.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 81.703.000,- atau sebesar 96.48%.

3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 883.216.740,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 780.616.200,- atau 88.38%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Ikan yang dipasarkan Ke Luar Daerah sebanyak 169.02 Ton.

- a. Sub. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.138.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 687.389.000,- atau sebesar 89.84%.
- b. Sub. Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.511.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp. 113.355.400,- atau sebesar 99.86%.

BAB III PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis 2021 – 2026 (Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Program) dan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perikanan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Dinas Perikanan yang terdiri atas 3 (tiga) bidang, dan kelompok jabatan fungsional (Pengawas) telah dapat merealisasikan program dan kegiatan beserta target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 tidak sepenuhnya berhasil memenuhi target yang telah direncanakan dan diharapkan. Dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan di tahun 2022 adalah Indikator jumlah produksi perikanan terbagi dua indikator yaitu, jumlah produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 21845.74 Ton dan terealisasi sebesar 21223.4 Ton atau sebesar 97.15% dan produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 976.72 Ton dan terealisasi sebesar 543.50 Ton atau sebesar 55.64%.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.

LAMPIRAN